

RINGKASAN

Burhan
NIM. 217410102048

Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Delik Pemalsuan Surat Tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) COVID-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh

Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H.

Pemalsuan dokumen hasil tes PCR COVID-19 merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan publik, terutama dalam konteks pandemi global. Hal ini diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, menganalisis hambatan dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap proses penanganan kasus di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Aceh telah berhasil menerapkan Pasal 263 KUHP secara efektif dalam menangani kasus pemalsuan dokumen tes PCR COVID-19. Meskipun demikian, hambatan teknis dalam identifikasi kasus dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pemalsuan dokumen tetap menjadi tantangan utama. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melibatkan analisis forensik dokumen, kerjasama dengan lembaga kesehatan, dan kampanye edukasi secara massif.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Polda Aceh meningkatkan kolaborasi dengan lembaga kesehatan dan laboratorium untuk memperkuat verifikasi dokumen hasil tes PCR COVID-19, menginvestasikan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis penyidik untuk menghadapi bukti digital yang kompleks, dan melanjutkan kampanye penyuluhan agar masyarakat lebih sadar akan bahaya pemalsuan dokumen kesehatan.

Kata Kunci: Fungsionalisasi, Hukum Pidana, Delik Pemalsuan Dokumen, Tes PCR COVID-19

SUMMARY

Burhan
NIM. 217410102048

Functionalization of Criminal Law against the Offense of Counterfeiting COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) Test Certificates in the Legal Area of the Aceh Regional Police

Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H.

Forgery of COVID-19 PCR test result documents is a serious crime with direct implications for public health and safety, especially during a global pandemic context. This is regulated under Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), guided by Law Number 6 of 2018 on Health Quarantine, Government Regulation Number 21 of 2020 on Large-Scale Social Restrictions to Accelerate the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), and Circular Letter of the COVID-19 Task Force Number 16 of 2022 on Domestic Travel Restrictions During the COVID-19 Pandemic.

This study aims to analyze the criminal law enforcement of forgery of COVID-19 PCR test result documents in the jurisdiction of the Aceh Regional Police, assess the challenges in handling cases of forgery of COVID-19 PCR test result documents in the jurisdiction of the Aceh Regional Police, and analyze efforts to overcome these challenges.

The research employs a qualitative approach using a case study method. Data were gathered through in-depth interviews, document analysis, and direct observation of case handling processes in the field. Data were analyzed descriptively and prescriptively.

The findings indicate that the Aceh Regional Police has effectively applied Article 263 of the Criminal Code in handling cases of forgery of COVID-19 PCR test result documents. However, technical barriers in identifying cases and low public awareness of the negative impacts of document forgery remain significant challenges. Efforts to address these obstacles involve forensic document analysis, collaboration with health institutions, and extensive educational campaigns.

Based on the research findings, it is recommended that the Aceh Regional Police enhance collaboration with health institutions and laboratories to strengthen verification of COVID-19 PCR test result documents, invest in human resources through technical training for investigators to handle complex digital evidence, and continue educational campaigns to raise public awareness about the dangers of health document forgery.

Keywords: *Functionalization, Criminal Law, Document Forgery Offense, COVID-19 PCR test*